

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penanggung PNM Mekaar Syariah Terhadap Wanprestasi Anggota Dalam Pembayaran Hutang Dengan Sistem Tanggung Renteng Di Kabupaten Tuban”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembayaran hutang pada PNM Mekaar Syariah terutama di Cabang Widang Kabupaten Tuban, dan juga mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah penanggung dalam sistem tanggung renteng yang ada di PNM Mekaar Syariah Cabang Widang Kabupaten Tuban.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sedang berlangsung secara sistematis dan faktual. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis untuk memberikan makna dan kesimpulan yang sesuai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penagihan yang dilakukan secara kelompok, dimana setiap minggu anggota dan tidak menunjukkan itikad baik hingga batas waktu yang ditentukan, maka kewajiban pembayaran dialihkan kepada anggota lain melalui sistem tanggung renteng. Penelitian ini menelaah praktik penagihan utang dan sistem tanggung renteng dalam program PNM Mekaar Syariah Cabang Widang melalui pendekatan hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Dalam konteks hukum, sistem ini belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Beberapa asas penting seperti keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum belum terlindungi secara maksimal, Sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah penanggung. secara syariah, skema tanggung renteng dapat dikategorikan sebagai akad *kafālah* jika bersifat sukarela dan jelas. Namun dalam kasus Desa Patihan, akad tersebut melanggar rukun dan syarat *kafālah* karena tidak terdapat kejelasan makful ‘anhu atau persetujuan yang sah. Penelitian ini menekankan perlunya penyesuaian mekanisme pembiayaan kelompok agar sejalan dengan prinsip perlindungan hukum yang adil dan transparan bagi seluruh pihak.

Kata kunci: Tanggung renteng, Perlindungan hukum, *kafālah*, PNM Mekaar Syariah

ABSTRACT

This thesis is entitled “Legal Protection for Guarantor Clients of PNM Mekaar Syariah Against Breach of Commitment of Members in Debt Repayment with a Joint Liability System in Tuban Regency.” The study aims to analyze the debt repayment process at PNM Mekaar Syariah, particularly at the Widang Branch in Tuban Regency, and to examine the legal protection available to guarantor clients within the joint liability system used by PNM Mekaar Syariah Widang Branch, Tuban Regency.

This research employs a descriptive-analytical approach, designed to systematically and factually portray ongoing circumstances. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The gathered data were then analyzed to derive meaningful conclusions.

*The results show that debt collection is conducted collectively: each week, during group meetings, if a member defaults or fails to demonstrate good intent within the specified timeframe, the payment obligation is transferred to other members through the joint liability system. The study examines the debt collection practices and joint liability system in the PNM Mekaar Syariah Widang Branch program through the lenses of positive law and sharia economic law. From a legal perspective, this system does not yet fully reflect the consumer protection provisions outlined in Law No. 8 Year 1999 on consumer protection. Several important principles—such as justice, balance, and legal certainty—are not adequately safeguarded, resulting in harm to the guarantor clients. From a sharia standpoint, the joint liability scheme could qualify as a valid *kafālah* contract if it is voluntary and clearly defined. However, in the case of Patihan Village, the contract violates the pillars and conditions of *kafālah* because there is no clarity about the guaranteed party (*makfūl ‘anhu*) or legitimate consent. This study emphasizes the need to adjust the group financing mechanism so that it aligns with principles of fair and transparent legal protection for all parties involved.*

Keywords: Joint liability, Legal protection, kafālah, PNM Mekaar Syariah